

MAKALAH
MASALAH-MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK

Dosen Pengampu:

Dr. ANI AGUS PUSPAWATI, S.AP., M.AP



Disusun Oleh:

Egi Yunitassari	1916041022 (UNILA)
Risandi Koswara	1916041038 (UNILA)
Cintania Ade R	1916041040 (UNILA)
Aqila Mufida S	1916041072 (UNILA)
Tria Yossy Daniel	190910201145 (UNEJ)

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

2021

PEMBAHASAN

Masalah-Masalah Publik

1. Pengertian Masalah Publik

Dalam analisis kebijakan, dimulai dari pernyataan mengenai masalah yang diusulkan untuk dianalisis. Perumusan masalah analisis merupakan pernyataan substantif masalah yang melibatkan alternatif kebijakan dan konsekuensinya. Salah satu cara untuk mendefinisikan situasi masalah adalah dengan merumuskan nilai-nilai umum yang mendasar. Salah satu sumber masalah adalah perubahan sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, perubahan demografi, alih profesi.

Suatu fenomena dapat menjadi masalah publik ketika fenomena tersebut dirasakan sebagai kesulitan bersama oleh kelompok masyarakat dan hanya dapat diatasi oleh intervensi pemerintah. Menurut Subarsono, masalah publik ini muncul ketika belum terpenuhinya kebutuhan, nilai atau kesempatan yang diinginkan oleh publik dan pemenuhannya hanya mungkin dilakukan melalui kebijakan pemerintah. Menurut E. Rushefky terdapat 2 proses penting dalam mengidentifikasi masalah, yaitu:

- a) Persepsi: penerimaan (*receiving*) dari suatu peristiwa yang mempunyai konsekuensi terhadap orang/kelompok.
- b) Definisi: interpretasi dari peristiwa-peristiwa tersebut memberinya makna dan membuat jelas.

Menurut Sahya Anggara (2014: 25) masalah dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang yang menginginkan pertolongan atau perbaikan. Sementara itu, suatu masalah akan menjadi masalah publik jika melibatkan banyak orang dan mempunyai akibat yang tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang terlibat langsung, tetapi juga pada kelompok orang yang tidak terlibat secara langsung.

Menurut Theodore J. Lowi (1972) masalah-masalah publik dapat dikategorikan kedalam beberapa kategori tertentu. Pertama, masalah publik dapat dibedakan menjadi masalah prosedural dan masalah substantif. Masalah prosedural ini berhubungan dengan cara pemerintah diorganisasikan dan cara pemerintah melakukan tugas-tugasnya. Sedangkan,

masalah substantif ini berkaitan dengan akibat-akibat nyata dari kegiatan manusia. Kategori kedua adalah berdasarkan asal usulnya masalah publik dapat dibedakan menjadi masalah luar negeri dan masalah dalam negeri. Kategori ketiga adalah masalah publik dapat dibedakan berdasarkan jumlah orang yang dipengaruhi serta hubungan antara satu dan yang lain. Berdasarkan kategori ini, masalah publik dapat dibedakan menjadi masalah distributif, masalah regulasi, dan masalah redistributif. Masalah distributif ini mencakup sejumlah kecil orang dan dapat ditanggulangi satu per satu. Sedangkan, masalah regulasi ini mendorong timbulnya tuntutan-tuntutan yang diajukan dalam rangka membatasi tindakan-tindakan pihak lain. Adapun masalah redistributif menyangkut masalah yang menghendaki perubahan sumber antarkelompok atau kelas dalam masyarakat.

Menurut William Dunn (2000) terdapat beberapa perbedaan antara masalah kebijakan dan masalah non-kebijakan, antara lain:

- a. Saling bergantung (*interdependence*), artinya bahwa masalah kebijakan sering mempengaruhi masalah kebijakan lainnya (*complicated*). Russel L. Ackroff menyebutnya dengan nama *messes*, yaitu masalah kebijakan bukan sebuah masalah yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari keseluruhan sistem analisis terhadap masalah kebijakan pun tidak sederhana yang dibayangkan. Pendekatan yang digunakan harus menyeluruh dan komprehensif.
- b. Subjektif (*subjective*), artinya sebuah kondisi eksternal yang menimbulkan masalah didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif. Sebuah masalah juga bisa bersifat objektif, artinya dapat dipengaruhi oleh faktor yang datang dari luar.
- c. Sifat buatan dari masalah, artinya bahwa masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah beberapa situasi masalah. Masalah kebijakan ini merupakan hasil dari penilaian subyektif manusia, kondisi sosial yang objektif, dan karena itu masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial.
- d. Dinamika masalah kebijakan, artinya terdapat banyak solusi untuk suatu masalah sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap masalah tersebut.

2. Munculnya Permasalahan

Menurut Robert B. Seidman, Ann Seidman, dan Nalin Abeysekere (1999) masalah dapat muncul dari akibat adanya beberapa hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mereka mencoba merancang metode yaitu *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process*, dan *Ideology* atau yang dikenal dengan metode ROCCIP. Penjelasan mengenai metode tersebut adalah sebagai berikut.

- a. *Rule* (peraturan), peraturan dimaksudkan untuk mengatur segala perilaku manusia. Dalam hal ini peraturan berkaitan dengan semua masalah publik atau masalah yang ditimbulkan oleh publik. Masalah publik dapat muncul jika:
 - 1) Rancunya atau membingungkannya bahasa yang digunakan dalam peraturan, seperti tidak jelasnya hal-hal yang dilarang dan yang harus dilakukan oleh masyarakat;
 - 2) Beberapa peraturan dapat menjadi peluang penyebab perilaku bermasalah;
 - 3) Peraturan sering memperluas pembagian perilaku bermasalah bukan menghilangkannya;
 - 4) Peraturan membuka peluang bagi perilaku yang tidak transparan;
 - 5) Peraturan memberikan wewenang berlebih pada pelaksana peraturan untuk bertindak represif.
- b. *Opportunity* (kesempatan), seseorang dapat melakukan perilaku bermasalah apabila terdapat kesempatan yang terbuka. Jika kesempatan terbuka, maka dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan penyimpangan. Dalam hal ini lingkungan menjadi faktor yang dominan terhadap penyebab perilaku yang menyimpang.
- c. *Capacity* (kemampuan, hal ini berkaitan dengan pertukaran yang disebabkan tidak dapat memerintah seseorang untuk melakukan hal-hal diluar kemampuannya. Oleh sebab itu, perlu adanya pemahaman mengenai kondisi-kondisi setiap individu.
- d. *Commucication* (komuikasi), munculnya perilaku bermasalah dapat diakibatkan dari ketidaktahuan masyarakat mengenai peraturan yang ada. Hal tersebut terjadi karena adanya komunikasi yang tidak baik (miss-communication). Permasalahan komunikasi ini merupakan permasalahan klasik yang sering terjadi di negara yang kaya akan budaya atau sangat plural.

- e. *Interest* (kepentingan), kategori ini menjelaskan mengenai pandangan individu mengenai akibat dan manfaat dari setiap perilakunya. Akibat dan manfaat yang ditimbulkan ini bisa dalam bentuk materiil (keuntungan ekonomi) dan non-materiil (pengakuan dan penghargaan).
- f. *Process* (proses), hal ini menjadi sebuah instrument dalam menemukan pembagian perilaku bermasalah yang dilakukan dalam atau oleh suatu organisasi. Beberapa proses yang digunakan untuk merumuskan masalah dalam organisasi, yaitu proses pengumpulan input, proses pengolahan input menjadi keputusan, proses output, dan umpan balik.
- g. *Ideology* (nilai/sikap), suatu nilai yang berlaku dalam masyarakat merupakan hasil dari kesepakatan bersama dalam sebuah kelompok. Nilai dalam masyarakat yang sangat beragam (heterogen) membuat kemungkinan terjadinya konflik sangat besar.

Berdasarkan metode ROCCIPI tersebut, dimaksudkan untuk mempersempit dan membuat sistematisa ruang lingkup pandangan bagi para aktor pembuat kebijakan atau analis kebijakan dalam mencoba menemukan pembagian suatu persoalan yang datang dari masyarakat.

3. Perumusan Masalah Kebijakan Publik

Masalah kebijakan ini berkaitan dengan masalah sosial dan masalah manusia, tetapi bukan pada apa yang dilakukan, melainkan pada apa yang seharusnya dilakukan terhadap masalah publik tersebut. Dalam perumusan kebijakan publik, tahapan perumusan masalah merupakan masalah yang sangat krusial dan menentukan. Hal ini menjadi dasar dan langkah awal dalam pembuatan kebijakan. Perumusan masalah ini akan menentukan bagaimana sebuah kebijakan akan disusun. Jika masalah yang diangkat salah, maka akan berakibat pada kegagalan implementasi kebijakan publik.

Menurut William Dunn (2000: 226) terdapat 4 langkah dalam perumusan masalah, antara lain, yaitu pertama, pencarian masalah (*problem search*). Pada tahap ini, para analis kebijakan harus dapat membedakan antara masalah publik dan masalah privat karena begitu banyaknya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, maka tidak semua masalah dapat diangkat menjadi masalah publik yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan. Selanjutnya para analis kebijakan pun harus siap dihadapkan pada

metamalah. Kedua, yaitu pendefinisian masalah (*problem definition*). Pada tahap ini, merupakan tahap menganalisis dari metamalah ke masalah substantif yang kemudian di kategorisasikan masalah-masalah yang bersifat dasar dan umum. Ketiga, yaitu menspesifikasi masalah (*problem specification*). Setelah melakukan pendefinisian masalah, tahap selanjutnya adalah analisis kebijakan membuat spesifikasi masalah yang lebih terperinci. Melalui spesifikasi masalah, maka proses perpindahan dari masalah substantif ke masalah formal dapat dilakukan. Keempat, yaitu pengenalan masalah (*problem sensing*). Setelah masalah dispesifikasikan, maka tahapan yang terakhir adalah pengenalan masalah. Pada tahap ini akan muncul berbagai kesulitan bagi para pembuat kebijakan, dimana kesulitan tersebut terjadi karena ketidaksesuaian antara masalah substantif dengan representasi formal dari masalah yang ada.

4. Permasalahan Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat dengan lingkup publik, yaitu merupakan lingkup bersama. Hal tersebut menjelaskan bahwa lingkup publik butuh interaksi antara negara dengan warganya dalam suatu pengambilan keputusan yang salah satunya berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat.

Perubahan kebijakan pembangunan publik selalu menyebabkan perubahan sosial (kesejahteraan rakyat). Bahkan pembangunan adalah perubahan sosial itu sendiri. Perubahan-perubahan sosial dalam pembangunan tidak hanya bersifat positif, akan tetapi dapat pula bersifat negatif. Oleh sebab itu, hal inilah yang selalu jadi pendorong munculnya perhatian dan pemikiran mengenai pentingnya kebijakan publik dalam memandu kegiatan-kegiatan pembangunan. Sebagai misal beberapa negara berkembang termasuk Indonesia, pengangguran, kemiskinan, kesenjangan sosial, kelangkaan pelayanan sosial yaitu masalah sosial utama dari dulu sampai sekarang. Bahkan terjadi kecenderungan penurunan standar kehidupan karena terjadi banyak perubahan sosial sejalan dengan proses transisi dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Sementara masalah-masalah sosial konvensional seperti kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan masih belum teratasi. Masalah-masalah sosial kontemporer, seperti perdagangan manusia, pengangguran, perilaku menyimpang, kenakalan remaja, dan eksploitasi terhadap anak kian muncul mewarnai fenomena kehidupan masyarakat modern. Oleh sebab itu dalam konteks pembangunan nasional, kebijakan publik menjadi

suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan dan menerjemahkan tujuan- tujuan pembangunan.

Khusus, mengenai kebijakan publik yang berorientasi kepada pencapaian tujuan kesejahteraan rakyat, maka harus dimaknai dalam dua pengertian pokok, yaitu: memecahkan masalah kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan sosialnya. Sehingga alur kebijakan publik dalam dimensi mencapai tujuan kesejahteraan rakyat adalah:

- (1) mengidentifikasi dan menentukan tujuan kesejahteraan rakyat
- (2) Memecahkan masalah kesejahteraan rakyat
- (3) Merumuskan kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat
- (4) Memenuhi kebutuhan sosial secara keseluruhan.

Dalam kaitan ini, tujuan pemecahan masalah memiliki arti mengusahakan atau mengadakan perbaikan dikarenakan ada sesuatu keadaan yang tidak diharapkan (misalnya kemiskinan) atau kejadian yang bersifat destruktif atau patologis yang mengganggu dan merusak tatanan masyarakat. Tujuan pemenuhan kebutuhan mengandung arti menyediakan pelayanan- pelayanan sosial yang diperlukan, baik dikarenakan adanya masalah maupun tidak ada masalah, dalam arti bersifat pencegahan (mencegah terjadinya masalah, mencegah tidak terulang atau timbul lagi masalah, atau mencegah meluasnya masalah) atau pengembangan (meningkatkan kualitas suatu kondisi agar lebih baik dari keadaan sebelumnya).

Masalah kebijakan publik ini menjadi fokus pembahasan dalam proses kebijakan pada tahap penyusunan agenda, dimana pada tahap ini menjadi ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas agenda publik akan dibahas. Jika sebuah isu yang ada dalam masyarakat menjadi masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka masalah publik akan diangkat ke dalam agenda pemerintah. Isu kebijakan (*policy issues*) sering juga disebut masalah kebijakan (*policy problem*).

Menurut William Dunn (2000), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan, baik tentang rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu

masalah tertentu. Namun, tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Ada beberapa kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik, antara lain:

- a) Telah mencapai titik kritis tertentu jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius;
- b) Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu berdampak dramatis; orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa;
- c) Menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa;
- d) Menjangkau dampak yang amat luas; Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat;
- e) Menyangkut suatu persoalan yang *fashionable* (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya).

5. Tipe-Tipe Masalah Publik

Charles O. Jones (1963) membuat dua tipe masalah publik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Masalah tersebut dikarakteristikan oleh adanya perhatian kelompok dan warga kota yang terorganisasi yang bertujuan untuk melakukan tindakan.
- 2) Masalah tersebut tidak dapat dipecahkan secara individual, tetapi kurang terorganisasi dan kurang mendapatkan dukungan.

Tipologi masalah publik dalam analisis kebijakan sebagaimana dikemukakan William N. Dunn ditinjau dari tingkat kompleksitasnya dikategorikan menjadi 3 yaitu:

- 1) Masalah yang terstruktur dengan baik (*well structured*),
- 2) Masalah yang agak terstruktur (*moderately structure*), dan
- 3) Masalah yang tidak terstruktur (*ill structured*).

Masalah yang terstruktur dengan baik adalah masalah yang memiliki sedikit pembuat kebijakan yang terlibat dalam pemecahan dengan solusi alternatif yang terbatas, nilai dari 40 Analisis Kebijakan Publik pemecahan masalah disetujui, dan hasilnya lebih dapat

dipastikan dengan tingkat probabilitas yang dapat diperhitungkan. Contoh masalah ini adalah rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam hal ini pegawai negeri sipil yang diberi wewenang untuk menentukan atau melaksanakan persyaratan penerimaan/pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil, gajinya berapa, dll sudah jelas.

Disisi lain, masalah yang agak terstruktur, adalah masalah yang melibatkan beberapa pengambil keputusan dalam pemecahannya, solusi alternatif terbatas, nilai yang akan dikejar disepakati, tetapi hasilnya tidak pasti dengan probabilitas yang sulit untuk dihitung. Contoh dalam hal ini, misalnya, soal pembebasan lahan untuk pembangunan (perluasan jalan, proyek pembangunan lainnya), yang dikenakan ganti rugi. Ada banyak instansi yang terlibat dalam memecahkan masalah ini dan tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan atau konsensus harga antara pemilik tanah dan pemerintah.

Masalah yang tidak terstruktur adalah masalah yang melibatkan banyak politisi dalam memecahkan masalah, alternatif pemecahannya tidak terbatas, nilai yang dikejar masih menimbulkan konflik, hasil akhirnya sangat sulit ditentukan dengan pasti karena probabilitasnya sangat sulit untuk dihitung. Kemiskinan, pengangguran, maksiat sangat cocok untuk masalah ini. Tidak hanya pemerintah tetapi juga lembaga/organisasi non-pemerintah cenderung menyelesaikan masalah ini. Namun, konflik sering muncul ketika memilih alternatif terbaik dari beberapa alternatif.

6. Masalah Publik ditinjau dari Tingkat Kompleksitasnya

Menurut William N. Dunn tipe masalah publik dalam analisis kebijakan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

- Masalah yang terstruktur dengan baik (*well structured*), dalam hal ini pemecahan masalah hanya melibatkan beberapa pembuat kebijakan dengan alternatif pemecahan yang terbatas dan dengan nilai dari pemecahan masalah disetujui, serta hasilnya akan lebih dapat dipastikan dan juga tingkat peluang/kemungkinan dapat diperhitungkan. Contoh dari tipe masalah ini yaitu pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pejabat yang berwenang akan mengangkat maupun mengadakan syarat untuk diterima sebagai PNS, dan dalam hal ini gaji maupun hal sebagainya sudah dapat terlihat jelas.

- Masalah yang agak terstruktur (*moderately structure*), masalah ini pemecahannya akan melibatkan beberapa pembuat kebijakan (*policy maker*), dengan alternatif pemecahan yang terbatas dan nilai yang akan dikejar disetujui. Namun, hasilnya tidak pasti dengan tingkat probabilitas yang sulit dihitung. Contoh dari tipe masalah ini yaitu, masalah pembebasan tanah untuk pembangunan (pelebaran jalan, proyek pembangunan lainnya) yang membutuhkan ganti rugi. Hal ini akan melibatkan banyak instansi, dengan nilai yang dikejar yaitu tercapainya kesepakatan atau consensus harga antara pemilik tanah dan pemerintah.
- Masalah yang tidak terstruktur (*ill structured*), masalah ini pemecahannya akan melibatkan banyak pembuat kebijakan (*policy maker*) serta alternatif pemecahannya tidak terbatas dan juga nilai yang akan dikejar masih menimbulkan konflik. Dalam hal ini hasil akhirnya akan sangat sulit diketahui dengan pasti karena tingkat kemungkinannya sangat sulit dihitung. Contoh dari tipe masalah ini yaitu, kemiskinan, pengangguran, kemaksiatan dan lain sebagainya. Dalam tipe masalah ini pemecahannya bukan hanya dari pemerintah melainkan lembaga/organisasi non pemerintah juga cenderung berupaya untuk memecahkan masalah ini. Namun, seringkali terjadi konflik dalam pemilihan alternatif yang dianggap terbaik.

Tipe masalah publik lain yaitu dijelaskan oleh Charles D. Jones yang dalam hal ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Masalah yang dikarakteristikan oleh adanya perhatian warga kelompok dan warga kota yang terorganisasi yang bertujuan untuk melakukan suatu tindakan.
2. Masalah yang tidak dapat dipecahkan secara individual/pribadi, tetapi kurang terorganisasi (dan kurang mendapatkan dukungan).

Perbedaan masalah tersebut menurut Jones merupakan hal yang kritis dalam memahami kompleksitas proses yang berlangsung, Hal ini dikarenakan ada beberapa masalah yang dapat sampai ke pemerintah, dan masalah masalah lain yang tidak sampai kepada pemerintah. Menurut Jones, dalam hal ini suatu masalah dapat atau tidaknya untuk sampai kepada pemerintah tergantung oleh sikap dukungan dari pihak pihak yang berkepentingan terhadap masalah tersebut. Jika suatu masalah publik mendapat dukungan yang luas dalam masyarakat maupun kelompok-kelompok yang berkepentingan, maka

masalah ini akan sampai kepada pemerintah karena mau bagaimanapun pemerintah akan lebih mendahulukan kepentingan publik.

Contoh Kasus:

Pandemi Covid-19 merupakan masalah yang saat ini dialami oleh seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Masalah pandemi Covid-19 ini telah menjadi masalah publik karena berdampak pada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan adanya pandemi ini membuat pemerintah harus sigap dalam mengatasi penyebarannya agar kondisi terkendali. Permasalahan pandemi ini menjadi masalah yang sangat genting karena menyangkut hidup orang banyak, jika tidak ditangani dengan baik, maka akan mengakibatkan jumlah masyarakat yang terpapar Covid-19 semakin tinggi.

Dilihat dari jenis masalahnya, permasalahan pandemi Covid-19 dapat diidentifikasi dengan 2 hal, yaitu substantif dan juga prosedural. Dalam hal substantif, dapat dilihat melalui beberapa penelitian di beberapa Universitas terkemuka didunia yang hasilnya menyimpulkan bahwa Covid-19 mempunyai 3 varian pada 24 Desember 2019 sampai 4 Maret 2020. Sementara NIBG (*National Institute of Biomedical Genomic*) melakukan penelitian dan mendapatkan hasil bahwa ada 10 jenis baru virus yang telah bermutasi dan berbeda-beda. Dibeberapa kasus ada salah satu variannya teruji sangat ganas melebihi SARS yang merebak pada 2003 silam. Hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai langkah Indonesia dalam menentukan langkah kebijakan. Dengan adanya identifikasi jenis baru maka dapat menjadi peluang dalam penanganan pasien, pengendalian penyebaran, dan penemuan vaksin.

Dalam aspek procedural, dapat dilihat dari pemahaman upaya efektivitas PSBB, larangan mudik, *physical distancing*, himbauan dirumah saja dan sejenisnya. Beberapa analisa dapat menentukan bahwasannya masalah pandemi Covid-19 ini merupakan masalah rumit, kompleks, dan tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa. Alasan yang membuat mengapa masalah Covid-19 menjadi masalah yang rumit:

1. Terbitnya Keppres No.7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) pada (13/3) dan Keppres No.12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam, penyebaran Covid-19 sebagai bencana

- nasional. Namun, masih tidak adanya struktur untuk penanganan pandemi di Indonesia. Tidak ada formulasi karena kompleksitas masalah Covid-19 yang ekstrim.
2. Masalah Covid-19 yang terus berkembang seperti terjadi PHK, meningkatnya kriminalitas, meruncingnya politik kepentingan, krisis kepercayaan, pelemahan koordinasi pusat dan daerah.
 3. Masalah Covid-19 terdiri dari banyak masalah yang berbeda, semuanya saling mempengaruhi satu sama lain.
 4. Banyak kelompok beragam yang memangku kepentingan dan bersaing untuk memberikan solusi masalah
 5. Solusi masalah Covid-19 bukan benar-salah, tetapi baik-buruk.
 6. Solusi potensial bersifat tidak terbatas, manfaat solusi yang berbeda ditentukan oleh penilaian dari pemangku kepentingan yang berbeda.

Rekomendasi :

Tolak ukur kesuksesan dalam penyelesaian pandemi Covid-19 ini adalah penurunan kurva pandemi. Dapat disimpulkan bahwa semakin sedikit orang terinfeksi virus maka semakin dekat dengan penyelesaian masalah Covid. Tapi hal tersebut bukan menjadi satu-satunya indikator keberhasilan karena percuma bila masalah Covid-19 selesai tetapi negara mengalami banyak kerugian diberbagai sektor seperti sumberdaya, ekonomi dan politik.

Menurut rekomendasi sumber menyebutkan bahwa perlu ada 3 penggolongan kebijakan publik, yaitu kebijakan pengendalian penyebaran Covid-19, kebijakan penanganan kasus, dan kebijakan pengendalian dampak. Untuk membantu tmerealisakisikan kebijakan tersebut, maka diperlukan lembaga semi permanen atau satuan tugas dan bantuan dari ahli dalam bidang substantif permasalahan dari pandemi Covid-19. Kemudian, perlu menggunakan pendekatan histori perihal masalah pandemi dengan pendekatan yang lain, serta perlu disusun suatu mekanisme penyampaian kebijakan dengan interaksi dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Maulana, A., & Rosmayati, S. (2020). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Guepedia.
- Meilinda, S. D., & Taufik. (2020). Covid-19: Struktur Masalah dan Pendekatan Kebijakan. *Prosiding Nasional Covid-19*, 82-88.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: AURA (CV. Anugrah Utama Raharja).
- Prabawati, I., Rahaju, T., Kurniawan, B. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*.
- Rihandoyo, R. Masalah-Masalah Administrasi Publik.
- Suryono, Agus. (2014). *Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. VI, Nomor 02.
- Sore, U. B. (2007). *Kebijakan Publik*. (Vol.1). SAH MEDIA.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: MNC Publishing.